



Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN/KOTA SEMESTER I TAHUN 2021

Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2021

Kata Pengantar

Puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota di wilayah DIY hingga triwulan II / semester I Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik. Kegiatan Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten/Kota di wilayah DIY Tahun 2021 mengacu pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, & Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD & RPJMD, serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Kegiatan Evaluasi RKPD Kabupaten/Kota ini dimaksudkan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan dengan mengidentifikasi faktor-faktor pendorong keberhasilan dan penghambat pencapaian kinerja pemerintah dalam hal pelaksanaan rencana pembangunan, dan sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan dan perumusan tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD Kabupaten/Kota periode berikutnya.

Pelaksanaan kegiatan evaluasi dilaksanakan terhadap lima (5) Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Daerah (Pemda) DIY, melalui Bappeda DIY. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kabupaten/Kota, terutama Bappeda Kab/Kota se-DIY yang telah bekerjasama membantu penyusunan evaluasi RKPD di Pemda DIY sampai dengan triwulan II / semester I Tahun 2021. Semoga laporan Evaluasi RKPD Kabupaten/Kota ini dapat memberikan masukan penting bagi Pemda DIY sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan, perbaikan dan penyusunan RKPD pada periode berikutnya. Apabila ada kekurangan dari laporan ini kami memohon maaf dan kami sangat mengharapkan masukan untuk kesempurnaan laporan ini.

Yogyakarta, 2021

Kepala Bappeda DIY

Drs. Beny Suharsono, M.Si.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL	V
DAFTAR GAMBAR.....	VIII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud Dan Tujuan	2
1. Maksud	2
2. Tujuan	2
C. Dasar Hukum	2
D. Lingkup Kegiatan	3
E. Sistematika Laporan	4
BAB II KERANGKA PIKIR EVALUASI RKPD	5
A. Hubungan antar Dokumen Perencanaan.....	5
B. Pengukuran Kinerja dan Indikator Kinerja Pemerintah Daerah	8
C. Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.....	9
D. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD hingga Tahun Berjalan	11
BAB III METODE EVALUASI.....	12
A. Tata Cara Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi.....	12
B. Pendekatan Teknis Pelaksanaan Evaluasi RKPD Kabupaten/Kota	18
BAB IV ANALISIS HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN/KOTA SEMESTER I TAHUN 2020	20
A. Analisis Kinerja Sasaran dan Program RKPD Kabupaten/Kota	20
1. Kota Yogyakarta	20
2. Kabupaten Kulon Progo	38
3. Kabupaten Sleman	40

4. Kabupaten Bantul	43
5. Kabupaten Gunungkidul.....	45
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	69
A. Kesimpulan	69
B. Rekomendasi dan Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72

Daftar Tabel

Tabel 4.1.	Kinerja Fisik dan Anggaran Program Prioritas Sasaran Daerah Kota Yogyakarta	20
Tabel 4.2.	Kinerja Fisik dan Anggaran Program Prioritas Sasaran 1 Kota Yogyakarta	22
Tabel 4.3.	Kinerja Fisik dan Anggaran Program Prioritas Sasaran 2 Kota Yogyakarta	22
Tabel 4.4.	Kinerja Fisik dan Anggaran Program Prioritas Sasaran 3 Kota Yogyakarta	26
Tabel 4.5.	Kinerja Fisik dan Anggaran Program Prioritas Sasaran 4 Kota Yogyakarta	27
Tabel 4.6.	Kinerja Fisik dan Anggaran Program Prioritas Sasaran 5 Kota Yogyakarta	28
Tabel 4.7.	Kinerja Fisik dan Anggaran Program Prioritas Sasaran 6 Kota Yogyakarta	29
Tabel 4.8.	Kinerja Fisik dan Anggaran Program Prioritas Sasaran 7 Kota Yogyakarta	30
Tabel 4.9.	Kinerja Fisik dan Anggaran Program Prioritas Sasaran 8 Kota Yogyakarta	31
Tabel 4.10.	Kinerja Fisik dan Anggaran Program Prioritas Sasaran 9 Kota Yogyakarta	32
Tabel 4.11.	Kinerja Fisik dan Anggaran Program Prioritas Sasaran 10 Kota Yogyakarta	33
Tabel 4.12.	Kinerja Fisik dan Anggaran Program Prioritas Sasaran 11 Kota Yogyakarta	33
Tabel 4.13.	Kinerja Fisik dan Anggaran Program Prioritas Sasaran 12 Kota Yogyakarta	34

Tabel 4.14.	Kinerja Fisik dan Anggaran Program Prioritas Sasaran 13 Kota Yogyakarta.....	35
Tabel 4.15.	Kinerja Fisik dan Anggaran Program Prioritas Sasaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.....	39
Tabel 4.16.	Kinerja Fisik dan Anggaran Program Prioritas Sasaran Daerah Kabupaten Sleman.....	41
Tabel 4.17.	Kinerja Fisik dan Anggaran Program Prioritas Sasaran Daerah Kabupaten Bantul.....	44
Tabel 4.18.	Kinerja Fisik dan Anggaran Program Prioritas Sasaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.....	46
Tabel 4.19.	Kinerja Fisik dan Anggaran Program Prioritas Sasaran 1 Kab.Gunungkidul	47
Tabel 4.20.	Kinerja Fisik dan Anggaran Program Prioritas Sasaran 2 Kab.Gunungkidul	50
Tabel 4.21.	Kinerja Fisik dan Anggaran Program Prioritas Sasaran 3 Kab.Gunungkidul	51
Tabel 4.22.	Kinerja Fisik dan Anggaran Program Prioritas Sasaran 4 Kab.Gunungkidul	52
Tabel 4.23.	Kinerja Fisik dan Anggaran Program Prioritas Sasaran 5 Kab.Gunungkidul	54
Tabel 4.24.	Kinerja Fisik dan Anggaran Program Prioritas Sasaran 6 Kab.Gunungkidul.....	55
Tabel 4.25.	Kinerja Fisik dan Anggaran Program Prioritas Sasaran 7 Kab.Gunungkidul.....	56
Tabel 4.26.	Kinerja Fisik dan Anggaran Program Prioritas Sasaran 8 Kab.Gunungkidul.....	57
Tabel 4.27.	Kinerja Fisik dan Anggaran Program Prioritas Sasaran 9 Kab.Gunungkidul.....	59
Tabel 4.28.	Kinerja Fisik dan Anggaran Program Prioritas Sasaran 10 Kab.Gunungkidul.....	60

Tabel 4.29. Kinerja Fisik dan Anggaran Program Prioritas Sasaran 11 Kab.Gunungkidul.....	62
Tabel 4.30. Kinerja Fisik dan Anggaran Program Prioritas Sasaran 12 Kab.Gunungkidul.....	64
Tabel 4.31. Kinerja Fisik dan Anggaran Program Prioritas Sasaran 13 Kab.Gunungkidul.....	66
Tabel 4.32. Kinerja Fisik dan Anggaran Program Prioritas Sasaran 14 Kab.Gunungkidul.....	67
Tabel 5.1 Capaian Kinerja Fisik dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Triwulan II Tahun 2021.....	69

Daftar Gambar

Gambar 2.1.	Keterkaitan antar dokumen perencanaan	6
Gambar 2.2.	Proses penyusunan dokumen RKPD Kabupaten-Kota.....	7
Gambar 2.3.	Siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	9
Gambar 3.1.	Form Isian E.60 Evaluasi RKPD Kabupaten/Kota	13

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah diamanatkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Lebih lanjut RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Selain itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, perubahan dapat dilakukan apabila terjadi pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan oleh Bappeda guna memastikan tercapainya visi dan misi Kepala Daerah baik Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam RPJMD. Dokumen RKPD merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD, berupa

program/kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD. Dokumen RKPD ini juga dapat digunakan dalam menjaga konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD. Merupakan landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Perubahan Prioritas plafon Anggaran Sementara untuk menyusun RAPBD, dan merupakan pedoman dalam mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD. Salah satu fungsi adanya RKPD dalam perencanaan pembangunan daerah adalah berkaitan dengan kebijakan penganggaran.

B. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

Kegiatan Evaluasi RKPD Kabupaten/Kota di Pemda DIY Tahun 2021 Triwulan II adalah untuk menilai dan mengevaluasi:

- a. Pencapaian target-target rencana program/kegiatan di masing-masing Kabupaten/Kota sesuai dalam RKPD Tahun 2021.
- b. Realisasi penyerapan anggaran kegiatan di masing-masing Kabupaten/Kota sesuai dalam APBD Tahun 2021.

2. Tujuan

- a. Memberikan gambaran capaian terhadap target kinerja dan pendanaan pelaksanaan RKPD Kabupaten/Kota hingga Triwulan II Tahun 2021.
- b. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RKPD Kabupaten/Kota hingga Triwulan II Tahun 2021.
- c. Merumuskan kesimpulan berupa rekomendasi dan saran untuk tindak lanjut sebagai bahan masukan dalam peningkatan kinerja pembangunan daerah Kabupaten/Kota.
- d. Menjadikan hasil evaluasi RKPD Kabupaten/Kota Triwulan II ini sebagai basis data untuk keperluan evaluasi-evaluasi lainnya.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam evaluasi hasil RKPD Kabupaten/Kota antara lain:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tata cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Gubernur DIY Nomor 48 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tata Cara Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah Dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

D. Lingkup Kegiatan

Dokumen Evaluasi terhadap RKPD Kabupaten/Kota Triwulan II Tahun 2021 berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Serta menggunakan asumsi-asumsi sebagai dasar pertimbangan evaluasi diantaranya tingkat kinerja program, asumsi ekonomi yang direpresentasikan dari hasil analisis pertumbuhan PDRB, dan dasar pertimbangan kebijakan daerah.

E. Sistematika Laporan

BAB I PENDAHULUAN

Memuat informasi mengenai latar belakang, tujuan, landasan hukum, lingkup pekerjaan dan sistematika penulisan laporan.

BAB II Kerangka Konseptual

Pada Bab ini akan diuraikan beberapa teori yang relevan mengenai pentingnya dilakukan monitoring dan evaluasi RKPD.

BAB III Metodologi

Pada Bab ini memaparkan metode pengumpulan serta analisis data.

BAB IV Analisis Hasil Evaluasi RKPD

Pada Bab ini akan diuraikan analisis evaluasi RKPD Triwulan II atau Semester I Tahun 2021.

BAB V Penutup

Pada Bab ini memuat kesimpulan dan rekomendasi

BAB II

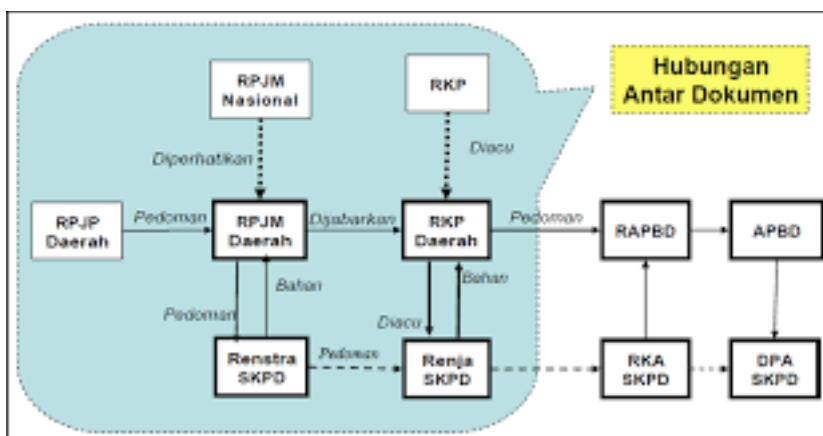
Kerangka Pikir Evaluasi RKPD

A. Hubungan antar Dokumen Perencanaan

Perencanaan pembangunan berdasar pada ruang lingkup waktu dapat dibedakan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk jangka pendek kurun waktu 1 tahunan. Kinerja Pemerintah Daerah secara kumulatif harus dapat berdampak pada kinerja Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Seluruh dokumen perencanaan harus saling terintegrasi dan saling mendukung pencapaian satu sama lain.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Negara (RPJPN) dan rencana tata ruang wilayah. Sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD). Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan umum anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon

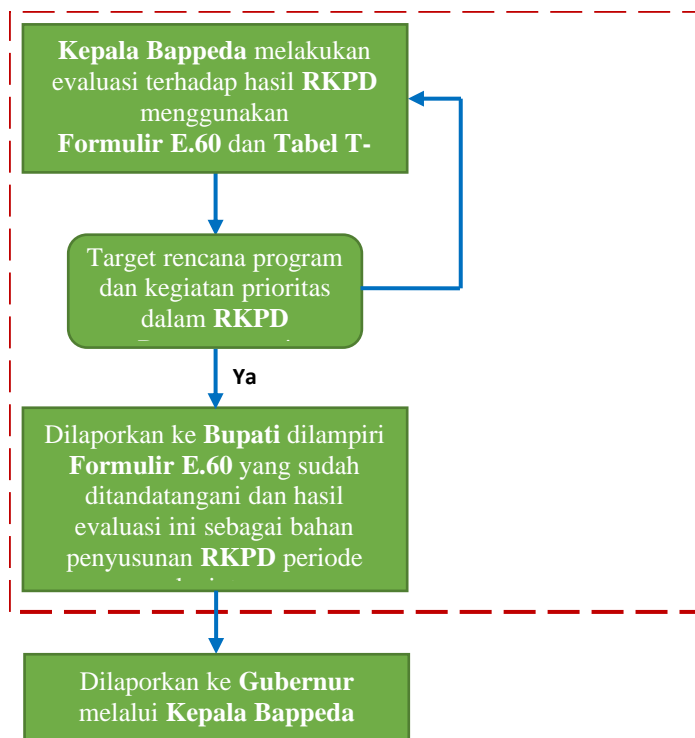
Anggaran Sementara (PPAS). Berikut dibawah ini gambar keterkaitan antar dokumen perencanaan:



Gambar 2.1. Keterkaitan antar dokumen perencanaan

Proses penyusunan dokumen RKPD Kabupaten/Kota ini dilaksanakan melalui proses yang melibatkan berbagai *stakeholders* atau pemangku kepentingan antara lain dari unsur Pemerintah Daerah bersama jajarannya, unsur DPRD dimasing-masing Kabupaten/Kota, dan melibatkan tenaga ahli perencanaan pembangunan. Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai *stakeholders* pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Pembangunan yang bermakna adalah yang memenuhi unsur kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, dapat menumbuhkan kebanggaan sebagai manusia, dan dapat memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk berpikir, berkembang, berperilaku dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut juga dengan rencana pembangunan tahunan daerah. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas Daerah, prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja, dan pendanaannya, baik yang dilakukan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Berikut disajikan dalam bentuk diagram alur proses penyusunan dokumen perencanaan tahunan:



Gambar 2.2. Proses penyusunan dokumen RKPD Kabupaten-Kota

B. Pengukuran Kinerja dan Indikator Kinerja Pemerintah Daerah

Seperti yang telah diketahui Pengukuran Kinerja (*Performance Measurement*) adalah pengukuran kinerja adalah proses mencatat, mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam arah pencapaian misi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses pelayanan publik. Dalam mengukur suatu kinerja diperlukan indikator kinerja, dimana indikator kinerja (*Performance Indicators*) pemerintah daerah memiliki karakteristik yang relative lebih rumit dibandingkan dengan indikator kinerja organisasi privat karena indikator kinerja pada pemerintah daerah lebih didominasi oleh indikator kinerja non finansial dibandingkan indikator kinerja finansial. Adapun definisi indikator kinerja adalah suatu instrument di dalam manajemen pencapaian kinerja. Dalam pengukuran kinerja secara berkepanjangan akan memberikan (*feedback*) atau umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara berkepanjangan terus berjalan akan menciptakan keberhasilan di masa yang akan datang.

Proses pengukuran kinerja pemerintah dibagi berdasarkan urusan, yaitu urusan wajib dan urusan pilhan. Pengukuran kinerja Pemerintah Daerah harus mencakup pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan. Indikator kinerja Pemerintah Daerah, meliputi indikator input, indikator proses, indikator *output*, indikator *outcome*, indikator benefit dan indikator *impact*. Pemda memiliki tanggungjawab besar dibidang ekonomi dan social secara bersama. Pengukuran kinerja Pemda harus mempertimbangkan indikator-indikator ekonomi dan sosial secara komprehensif yang mencakup:

1. Kondisi ekonomi nasional
2. Lingkungan bisnis
3. Stabilitas dan pengembangan
4. Kesehatan

5. Pendidikan



Gambar 2.3. Siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

C. Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Kepala BAPPEDA Kabupaten/Kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten/Kota dan melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada Bupati/Wali Kota. Pengendalian dan evaluasi perlu dilakukan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan. Adapun Evaluasi menurut OECD, disebutkan bahwa evaluasi merupakan proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan atau program. Evaluasi menurut pendapat Riyadi (2005:263) adalah proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai. Evaluasi dimaksudkan untuk menilai sampai sejauhmana kegiatan yang telah dilaksanakan mampu mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan, apabila ditemukan adanya kekurangan akan dilakukan perbaikan-perbaikan untuk dijadikan bahan perencanaan

berikutnya. Dalam hubungannya dengan perencanaan pembangunan daerah, evaluasi pembangunan merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari siklus kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Evaluasi dibedakan menjadi tiga jenis yaitu:

1. Pra Evaluasi, dimana evaluasi dilakukan pada saat program belum berjalan pada tahap perencanaan.
2. Evaluasi pada saat program tengah atau sedang berjalan, pada evaluasi ini lebih difokuskan pada penilaian dari setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan, walaupun belum bisa dilakukan penilaian terhadap keseluruhan proses program.
3. Evaluasi setelah program selesai/berakhir, pada evaluasi ini dilakukan pada seluruh tahapan program yang dikaitkan dengan tingkat keberhasilannya, sesuai dengan indikator yang ditetapkan.

Sedangkan pengendalian merupakan serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana yang ditetapkan SKPD. Pembangunan dengan menggunakan pendekatan secara terencana dan berkelanjutan telah menjadi kesepakatan global dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, kelestarian lingkungan, peningkatan indeks pembangunan manusia. Kesepakatan ini mulai tercermin diantaranya dengan adanya kesepakatan dalam implementasi MDGs, SDGs, dan *Green Economic*. Instrumen dari kesepakatan global tersebut mengamanatkan untuk melakukan perencanaan pembangunan di daerah dengan menitikberatkan proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dengan memanfaatkan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu.

Proses perencanaan dari kegiatan pembangunan kemudian diuraikan ke dalam dokumen perencanaan yang memuat kebijakan pembangunan dalam konteks nasional dan daerah. Pembuatan dokumen ini mengacu pada

kebijakan pembangunan di level nasional kemudian menjadi acuan pada kebijakan pembangunan di level daerah. Pada level daerah kemudian membuat dokumen pembangunan yang diawali dari pembuatan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD. Renja SKPD merupakan kebijakan operasional yang akan dijalankan instansi pemerintah daerah yang berasal dari pengembangan dokumen pembangunan sebelumnya.

D. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD hingga Tahun Berjalan

Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan tahun berjalan dalam hal ini pelaksanaan hingga triwulan II atau Semester I tahun 2020 dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan cara mengukur realisasi kinerja kemudian dibandingkan dengan target. Hasil pengukuran kinerja dapat memberi gambaran terhadap pencapaian hasil, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan khususnya di Kabutapen/Kota sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah perbaikan pada periode berikutnya. Untuk mengetahui capaian kinerja sasaran RKPD Kabupaten/Kota hingga triwulan II Tahun 2020, akan dibahas lebih rinci pada BAB IV.

Bab III

Metode Evaluasi

A. Tata Cara Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Evaluasi RKPD Kabupaten/Kota di DIY pada triwulan II atau semester I tahun 2021 merupakan suatu kegiatan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan RKPD Kabupaten/Kota tahun 2020 yang telah dibuat. Evaluasi ini dilakukan untuk menjamin bahwa RKPD Kabupaten/Kota telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun. Selain itu kegiatan evaluasi kebijakan RKPD bertujuan untuk menjamin bahwa pelaksanaan RKPD ini telah selaras dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022 dimana merupakan mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan. Selanjutnya instrument yang digunakan dalam mengevaluasi capaian program, kegiatan dan anggaran adalah format tabel dibawah ini:

Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Semester I Tahun (n)
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

[illegible]

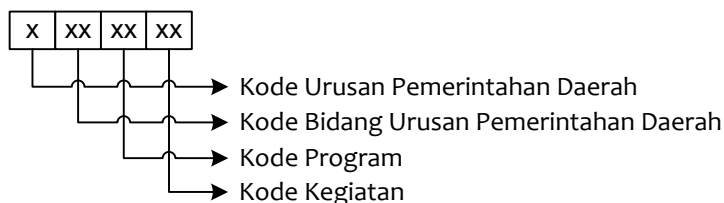
Gambar 3.1. Form Isian E.60 Evaluasi RKPD Kabupaten/Kota

PETUNJUK PENGISIAN

Cara Pengisian Tabel:

Tabel ini diisi oleh tim penyusun berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD dan/atau dari Laporan pertanggungjawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan. Provinsi/Kabupaten/Kota diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota.

- | | |
|-----------|---|
| Kolom (1) | diisi dengan nomor urut program prioritas sebagaimana yang tercantum, dalam RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi; |
| Kolom (2) | diisi dengan sasaran pembangunan pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten/Kota yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas RKPD Kabupaten/Kota; |
| Kolom (3) | diisi dengan kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan; |



Kolom (4) diisi dengan:

- Uraian nama urusan pemerintahan daerah;
- Uraian bidang urusan, sesuai dengan Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Uraian judul program yang direncanakan; dan
- Uraian judul kegiatan yang direncanakan.

Kolom (5) diisi sebagai berikut:

- Jenis indikator kinerja program (*outcome*)/kegiatan (*output*) sesuai dengan yang tercantum di dalam RPJMD Kabupaten/Kota;
- Indikator kinerja program (*outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun *output* telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu *outcome* program tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode RPJMD Kabupaten/Kota yang direncanakan

sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi; dan

- Indikator Kinerja Kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berkenaan;

Kolom (6) diisi dengan:

- Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan akhir periode RPJMD Kabupaten/Kota;
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sampai dengan akhir periode Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
- Jumlah/Besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten/Kota; dan
- Angka tahun diisi dengan tahun periode RPJMD Kabupaten/Kota;

Kolom (7) diisi dengan:

- Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-2;
- Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan tahun n-2;
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama RPJMD Provinsi sampai dengan tahun n-2;
- Contoh: RPJMD Kabupaten/Kota tahun 2007-2012, jika tahun berjalan (saat ini) adalah tahun 2010, maka RKPD Kabupaten/Kota tahun rencana adalah tahun 2011. Dengan demikian, Kolom 5 (lima) diisi dengan realisasi (kumulatif) mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 (realisasi APBD Kabupaten/Kota 2007, realisasi APBD Kabupaten/Kota 2009);

Kolom (8) diisi dengan:

- Pengisian Kolom ini bersumber dari dokumen RKPD Kabupaten/Kota tahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD Kabupaten/Kota tahun berjalan (tahun n-1);
- Untuk baris program diisi dengan:
 1. Jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD Kabupaten/Kota tahun berjalan; dan
 2. Jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD Kabupaten/Kota tahun berjalan;
- Untuk baris kegiatan diisi dengan:
 1. Jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD Kabupaten/Kota tahun berjalan; dan
 2. Jumlah anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan APBD Kabupaten/Kota tahun berjalan;

Kolom (9) sampai dengan Kolom (12) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada setiap triwulan untuk setiap program dan kegiatan dalam RKPD Kabupaten/Kota tahun berjalan;

Kolom (13) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) setiap program dan kegiatan mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun pelaksanaan RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi;

Kolom (14) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) RPJMD Kabupaten/Kota pada setiap program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi;

$$\text{Kolom (14)} = \text{Kolom (7)} + \text{Kolom (13)}$$

$$\text{Kolom (14)(K)} = \text{Kolom (7)(K)} + \text{Kolom (13)(K)}$$

$$\text{Kolom (14)(Rp)} = \text{Kolom (7)(Rp)} + \text{Kolom (13)(Rp)}$$

Kolom (15) diisi dengan rasio antara realisasi dan target RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan akhir tahun pelaksanaan RKPD yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp)

$$\text{Kolom (15)} = (\text{Kolom (14)} : \text{Kolom (6)(K)}) \times 100\%$$

$$\text{Kolom (15)(K)} = (\text{Kolom (14)(K)} : \text{Kolom (6)(K)}) \times 100\%$$

$$\text{Kolom (15)(Rp)} = (\text{Kolom (14)(Rp)} : \text{Kolom (6)(Rp)}) \times 100\%; \text{ dan}$$

Kolom (16) diisi dengan nama Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah j.o Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah.

- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
 - Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor penghambat yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
 - Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya diisi dengan usulan tindakan yang diperlukan pada triwulan berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahunan Kabupaten/Kota.
 - Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPDP berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RKPDP Kabupaten/Kota berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RKPDP kabupaten/Kota yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Usulan kebijakan ini terkait target kinerja dan pagu indikatif program prioritas pada RKPDP Kabupaten/Kota berikutnya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan tahunan Kabupaten/Kota.
1. Kepala BAPPEDA melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja pada formulir E.60, dengan menggunakan kriteria tercantum dalam table T-E.1.
 2. Kepala BAPPEDA Kabupaten/Kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPDP Kabupaten/Kota kepada Bupati/Wali Kota.
 3. Bupati/Wali Kota setiap bulan Januari menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPDP Kabupaten/Kota kepada Gubernur.

B. Pendekatan Teknis Pelaksanaan Evaluasi RKPDP Kabupaten/Kota

Pelaksanaan evaluasi RKPDP Kabupaten/Kota bertujuan untuk melihat sejauh mana kontribusi daerah (Kabupaten/Kota) terhadap capaian sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD DIY 2017-2022, dalam hal ini

melihat kesesuaian program dan indikator dan selanjutnya melihat kinerja program dari pelaksanaan RKPD 2019. Untuk itu dilakukan pendekatan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memetakan program prioritas dan kegiatan Kabupaten/Kota pada RKPD 2021. Adapun data yang menjadi rujukan utama adalah dokumen evaluasi RKPD Kabupaten/Kota Semester II Tahun 2021. Dokumen rapor kinerja Kabupaten/Kota juga digunakan sebagai referensi, tetapi hanya untuk melengkapi faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian kinerja.
2. Menghitung capaian kinerja program dan kegiatan tersebut beserta kinerja anggaran pada pertengahan dan akhir tahun RKPD dengan pendekatan interval dan kriteria penilaian sebagai berikut:

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA (PERMENDAGRI 86/2017)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

3. Memasukkan program prioritas dan indikator yang sesuai serta capaian kinerja program dan anggaran dari setiap Kabupaten/Kota dalam formulir E.61.

Bab IV

Analisis Hasil Evaluasi RKPD Kabupaten/Kota Semester I Tahun 2020

Secara umum hasil analisis beberapa sasaran dan program pada masing-masing Kabupaten/Kota hingga Triwulan II atau Semester I Tahun Anggaran 2021, dapat dirangkum sebagai berikut ini:

A. Analisis Kinerja Sasaran dan Program RKPD Kabupaten/Kota

1. Kota Yogyakarta

Terdapat 13 sasaran daerah yang tertuang didalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 yang dijabarkan ke dalam program-program utama sasaran daerah. Tabel berikut merangkum kinerja fisik dan anggaran dari program-program prioritas tersebut. Secara umum, capaian kinerja fisik program-program prioritas daerah hingga triwulan II tahun 2021 telah mencapai 90,84 persen dengan kinerja anggaran sebesar 49,66 persen. Untuk capaian kinerja fisik telah masuk dalam kategori sangat tinggi, namun untuk capaian anggaran masih masuk dalam kategori sangat rendah.

Tabel 4.1. Kinerja Fisik dan Anggaran Program Prioritas Sasaran Daerah Kota Yogyakarta

No	Sasaran	Capaian Kinerja TW II	
		Fisik	Keuangan
1	Kemiskinan Masyarakat Menurun	88,81	18,67

No	Sasaran	Capaian Kinerja TW II	
		Fisik	Keuangan
2	Keberdayaan Masyarakat Meningkat	88,58	53,36
3	Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat	96,69	58,81
4	Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun	108,55	47,15
5	Pertumbuhan Ekonomi Meningkat	87,97	62,56
6	Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Menurun	79,95	69,53
7	Kualitas Pendidikan Meningkat	94,59	63,74
8	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	72,32	54,56
9	Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Meningkat	91,74	33,29
10	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Meningkat	101,16	6,8
11	Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat	102,57	89,18
12	Infrastruktur Wilayah Meningkat	78,08	46,78
13	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	89,95	41,2
	Tingkat Capaian	90,84	49,66

Sumber: Dokumen Evaluasi RKPD Kota Yogyakarta Triwulan II Tahun 2021

Berikut akan dibahas capaian kinerja program utama sasaran daerah Kota Yogyakarta sampai dengan triwulan II tahun 2021.

a. Sasaran Pertama Kemiskinan Masyarakat Menurun

Sasaran ini terdiri dari 5 program dan didukung oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; Dinas Kesehatan; Dinas PUPKP; serta Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM. Berikut adalah rincian capaian kinerja dan anggaran program-program tersebut.

Tabel 4.2. Kinerja Fisik dan Anggaran Program Prioritas Sasaran 1 Kota Yogyakarta

No	Program	Capaian Kinerja TW II	
		Fisik	Keuangan
1	Program Pemberdayaan Sosial	100,00	37,22
2	Program Rehabilitasi Sosial	89,87	45,48
3	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	96,80	24,28
4	Program Penanganan Bencana	72,00	21,83
5	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100,00	78,43

Sumber: Dokumen Evaluasi RKPD Kota Yogyakarta Triwulan II Tahun 2021

Capaian kinerja fisik sasaran 1 sampai dengan triwulan II Tahun 2021 adalah sebesar 88,81 persen. Sementara dari sisi keuangan, capaian kinerja sasaran ini baru mencapai 18,67 persen. Untuk capaian kinerja fisik sudah masuk dalam kategori sangat tinggi, namun untuk capaian anggaran masih masuk dalam kategori sangat rendah. Pada sasaran ini, terdapat dua program pendukung yang capaian kinerja fisiknya sudah mencapai 100 persen. Kedua program tersebut adalah Program Pemberdayaan Sosial dan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

b. Sasaran Kedua Keberdayaan Masyarakat Menurun

Sasaran ini terdiri dari 49 program dan didukung oleh DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana); Dinas Sosial Nakertrans; Dinas Dikpora; Dinas Kesehatan; Satpol PP; BPBD; Dinas Pariwisata; Dinas Pertanian & Pangan; Dinas PUPKP; dan 14 Kemantren. Berikut adalah rincian capaian kinerja dan anggaran program-program tersebut.

Tabel 4.3. Kinerja Fisik dan Anggaran Program Prioritas Sasaran 2 Kota Yogyakarta

No	Program	Capaian Kinerja TW II	
		Fisik	Keuangan
1	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	63,73	19,93
2	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	106,08	49,85
3	Program Perlindungan Perempuan	151,23	39,03
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	66,67	57,57
5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	50,00	0,00
6	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	100,00	52,39
7	Program Perlindungan Khusus Anak	88,95	48,23
8	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	76,85	65,25
9	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100,00	88,17
10	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	74,63	46,09
11	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100,00	88,51
12	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100,00	91,05
13	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	101,68	86,83
14	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	91,42	83,74
15	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	79,44	72,44
16	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	85,94	73,81
17	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	98,09	87,40
18	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100,00	99,58
19	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	90,05	54,64
20	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	90,56	58,53
21	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	71,06	49,70

No	Program	Capaian Kinerja TW II	
		Fisik	Keuangan
22	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	93,04	60,74
23	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	89,77	85,41
24	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	94,07	97,26
25	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	79,85	50,77
26	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	90,86	84,56
27	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100,00	85,52
28	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	82,77	54,29
29	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	92,59	76,41
30	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	95,77	60,28
31	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	92,32	59,31
32	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	65,99	48,66
33	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	99,94	77,12
34	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	79,15	66,72
35	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	92,85	65,51
36	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	93,01	62,21
37	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	76,38	31,56
38	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	92,64	66,26
39	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100,00	69,35
40	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	94,44	61,06

No	Program	Capaian Kinerja TW II	
		Fisik	Keuangan
41	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	80,22	50,60
42	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	83,47	55,74
43	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	52,58	28,74
44	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	95,47	65,69
45	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100,00	68,12
46	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	81,89	42,28
47	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	68,28	45,78
48	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	101,17	68,29
49	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	85,36	56,32

Sumber: Dokumen Evaluasi RKPD Kota Yogyakarta Triwulan II Tahun 2021

Sampai dengan triwulan II tahun 2021, capaian fisik pada sasaran kedua memiliki realisasi sebesar 88,58 persen. Sedangkan untuk capaian anggaran tercapai sebesar 53,36 persen. Untuk capaian kinerja fisik sudah masuk dalam kategori tinggi, namun untuk capaian anggaran masih masuk dalam kategori rendah. Pada sasaran ini, terdapat tiga program pendukung yang capaian kinerja fisiknya masih rendah dan sangat rendah. Ketiga program tersebut adalah Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Bahkan, capaian anggaran Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak masih 0 persen.

c. Sasaran Ketiga Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat

Sasaran ini terdiri dari 10 program dan didukung oleh Dinas Pertanian dan Pangan; Dinas Sosial Nakertrans; Dinas PUPKP; Dinas Perdagangan; dan Dinas Kesehatan. Berikut adalah rincian capaian kinerja dan anggaran program-program tersebut.

Tabel 4.4. Kinerja Fisik dan Anggaran Program Prioritas Sasaran 3 Kota Yogyakarta

No	Program	Capaian Kinerja TW II	
		Fisik	Keuangan
1	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	96,36	68,67
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	100,00	85,14
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	100,00	79,87
4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	96,15	73,53
5	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	99,38	79,77
6	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	100,00	69,64
7	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	99,28	41,34
8	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	89,52	61,78
9	Program Perizinan Usaha Pertanian	94,45	45,97
10	Program Penyuluhan Pertanian	99,69	52,30

Sumber: Dokumen Evaluasi RKPD Kota Yogyakarta Triwulan II Tahun 2021

Pada triwulan II tahun 2021, capaian kinerja fisik sasaran ketiga dapat terealisasi sebesar 96,69 persen dengan capaian anggaran sebesar 58,81 persen. Untuk capaian kinerja fisik sudah masuk dalam kategori sangat tinggi, namun untuk capaian anggaran masih masuk dalam kategori rendah. Pada sasaran ini, terdapat tiga program pendukung yang capaian kinerja fisiknya sudah mencapai 100 persen. Ketiga program tersebut adalah Program Penanganan Kerawanan Pangan, Program Pengawasan Keamanan Pangan, dan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.

d. Sasaran Empat Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun

Sasaran keempat terdiri dari 11 program dan didukung oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM; Dinas Perdagangan; dan Dinas Kesehatan. Berikut adalah rincian capaian kinerja dan anggaran program-program tersebut.

Tabel 4.5. Kinerja Fisik dan Anggaran Program Prioritas Sasaran 4 Kota Yogyakarta

No	Program	Capaian Kinerja TW II	
		Fisik	Keuangan
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	108,09	94,60
2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	100,00	37,22
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	78,00	53,50
4	Program Hubungan Industrial	100,00	56,03
5	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	50,00	47,59
6	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	388,78	65,83
7	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	100,00	97,53
8	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	100,00	5,97
9	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	91,79	56,88
10	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil Dan Usaha Mikro	100,00	75,06
11	Program Pengembangan UMKM	71,92	46,04

Sumber: Dokumen Evaluasi RKPD Kota Yogyakarta Triwulan II Tahun 2021

Sampai dengan triwulan II Tahun 2021, capaian kinerja fisik sasaran ini mencapai 108,55 persen dengan capaian anggaran sebesar 47,15 persen. Untuk capaian kinerja fisik sudah masuk dalam kategori sangat tinggi, namun untuk capaian anggaran masih masuk dalam kategori sangat rendah. Pada sasaran ini terdapat satu program pendukung yang capaian kinerja fisik dan anggarannya masih masuk dalam kategori sangat rendah. Program tersebut adalah Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi.

e. Sasaran Kelima Pertumbuhan Ekonomi Meningkat

Sasaran ini terdiri dari 15 program dan didukung oleh Dinas Pariwisata; 14 Kemantren; Dinas Kebudayaan; Dinas Perdagangan; dan Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM. Berikut adalah rincian capaian kinerja dan anggaran program-program tersebut.

Tabel 4.6. Kinerja Fisik dan Anggaran Program Prioritas Sasaran 5 Kota Yogyakarta

No	Program	Capaian Kinerja TW II	
		Fisik	Keuangan
1	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	100,00	99,45
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	99,29	83,68
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	87,17	80,58
4	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	103,98	28,38
5	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	92,67	88,13
6	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	74,87	58,54
7	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	99,98	80,59
8	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	97,46	1,30
9	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	86,74	46,30
10	Program Pemasaran Pariwisata	85,25	38,04
11	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	45,52	25,65
12	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	99,75	44,89
13	Program Pelayanan Penanaman Modal	103,13	65,31
14	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100,36	74,24
15	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	99,99	61,06

Sumber: Dokumen Evaluasi RKPD Kota Yogyakarta Triwulan II Tahun 2021

Sampai dengan triwulan II Tahun 2021, capaian kinerja fisik sasaran 5 berhasil terealisasi sebesar 87,97 persen dengan capaian anggaran sebesar 62,56 persen. Untuk capaian kinerja fisik sudah masuk dalam kategori tinggi, namun untuk capaian anggaran masih masuk dalam kategori rendah. Pada sasaran ini terdapat satu program pendukung yang capaian kinerja fisik dan anggarannya masih masuk dalam kategori sangat rendah. Program tersebut adalah Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

f. Sasaran Keenam Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Menurun

Sasaran ini terdiri dari 9 program dan didukung oleh Satpol PP; Badan Kesbangpol; Dinas Dikpora; Dinas Sosial Nakertarns; DP3AP2KB; Bagian Kesra; dan 14 Kemantren. Berikut adalah rincian capaian kinerja dan anggaran program-program tersebut.

Tabel 4.7. Kinerja Fisik dan Anggaran Program Prioritas Sasaran 6 Kota Yogyakarta

No	Program	Capaian Kinerja TW II	
		Fisik	Keuangan
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	73,68	29,41
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	95,01	42,01
3	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	99,87	39,63
4	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomisocialdan Budaya	75,00	57,25
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	95,79	72,06
6	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	34,29	14,87

No	Program	Capaian Kinerja TW II	
		Fisik	Keuangan
7	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	100,00	51,99
8	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100,00	100,00
9	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	70,21	59,16

Sumber: Dokumen Evaluasi RKPD Kota Yogyakarta Triwulan II Tahun 2021

Sampai dengan triwulan II Tahun 2021, capaian kinerja fisik sasaran 6 berhasil terealisasi sebesar 79,95 persen dengan capaian anggaran sebesar 69,53 persen. Untuk capaian kinerja fisik sudah masuk dalam kategori tinggi, namun untuk capaian anggaran masih masuk dalam kategori sedang. Pada sasaran ini terdapat satu program pendukung yang capaian kinerja fisik dan anggarannya masih masuk dalam kategori sangat rendah. Program tersebut adalah Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.

g. Sasaran Ketujuh Kualitas Pendidikan Meningkat

Sasaran ini terdiri dari tiga program dan didukung oleh Dinas Dikpora; DP3AP2KB; dan 14 Kemantren. Berikut adalah rincian capaian kinerja dan anggaran program-program tersebut.

Tabel 4.8. Kinerja Fisik dan Anggaran Program Prioritas Sasaran 7 Kota Yogyakarta

No	Program	Capaian Kinerja TW II	
		Fisik	Keuangan
1	Program Pengelolaan Pendidikan	91,18	45,01
2	Program Pembinaan Perpustakaan	103,94	85,65
3	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	102,50	49,45

Sumber: Dokumen Evaluasi RKPD Kota Yogyakarta Triwulan II Tahun 2021

Sampai dengan triwulan II Tahun 2021, capaian kinerja fisik sasaran 7 berhasil terealisasi sebesar 94,59 persen dengan capaian anggaran sebesar 63,74 persen. Untuk capaian kinerja fisik sudah masuk dalam kategori sangat tinggi, namun untuk capaian anggaran masih masuk dalam kategori rendah.

h. Sasaran Delapan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat

Sasaran ini terdiri dari tujuh program dan didukung oleh Dinas Kesehatan; DP3AP2KB; 14 Kemantren; dan RS Jogja. Berikut adalah rincian capaian kinerja dan anggaran program-program tersebut.

Tabel 4.9. Kinerja Fisik dan Anggaran Program Prioritas Sasaran 8 Kota Yogyakarta

No	Program	Capaian Kinerja TW II	
		Fisik	Keuangan
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	41,22	14,09
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	64,78	32,55
3	Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	95,28	27,78
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	11,03	11,55
5	Program Pengendalian Penduduk	100,00	65,32
6	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	97,58	33,83
7	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	96,35	46,16

Sumber: Dokumen Evaluasi RKPD Kota Yogyakarta Triwulan II Tahun 2021

Sampai dengan triwulan II Tahun 2021, capaian kinerja fisik sasaran 8 berhasil terealisasi sebesar 73,32 persen dengan capaian anggaran sebesar 54,56 persen. Untuk capaian kinerja fisik sudah masuk dalam kategori sedang, namun untuk capaian anggaran masih masuk dalam kategori rendah. Pada sasaran ini terdapat dua program pendukung yang capaian kinerja fisik dan anggarannya

masih masuk dalam kategori sangat rendah. Kedua program tersebut adalah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

i. Sasaran Sembilan Peran serta Masyarakat dalam pengembangan dan Pelestarian Budaya Meningkat.

Sasaran ini terdiri dari dua program dan didukung oleh Dinas Kebudayaan; Dinas Perhubungan; Dinas Pariwisata; Dinas Perinkop UKM; Dinas PUPKP; Dinas Pertanahan dan Tata Ruang; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Dinas Dikpora; dan 14 Kemantren. Berikut adalah rincian capaian kinerja dan anggaran program-program tersebut.

Tabel 4.10. Kinerja Fisik dan Anggaran Program Prioritas Sasaran 9 Kota Yogyakarta

No	Program	Capaian Kinerja TW II	
		Fisik	Keuangan
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	91,15	22,98
2	Program Pengembangan Kebudayaan	100,00	20,27

Sumber: Dokumen Evaluasi RKPD Kota Yogyakarta Triwulan II Tahun 2021

Sampai dengan triwulan II Tahun 2021, capaian kinerja fisik sasaran 9 berhasil terealisasi sebesar 91,74 persen dengan capaian anggaran sebesar 33,29 persen. Untuk capaian kinerja fisik sudah masuk dalam kategori sangat tinggi, namun untuk capaian anggaran masih masuk dalam kategori sangat rendah.

j. Sasaran Sepuluh Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Meningkat

Sasaran ini terdiri dari tujuh program dan didukung oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang; Dinas PMPTSP; Dinas PUPKP; dan

Dinas Lingkungan Hidup. Berikut adalah rincian capaian kinerja dan anggaran program-program tersebut.

Tabel 4.11. Kinerja Fisik dan Anggaran Program Prioritas Sasaran 10 Kota Yogyakarta

No	Program	Capaian Kinerja TW II	
		Fisik	Keuangan
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	100,75	56,12
2	Program Pengelolaan Izin Lokasi	105,29	90,58
3	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	118,67	44,99
4	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	100,00	1,41
5	Program Pengelolaan Tanah Kosong	91,01	62,29
6	Program Penatagunaan Tanah	100,00	65,75
7	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	100,00	46,63

Sumber: Dokumen Evaluasi RKPD Kota Yogyakarta Triwulan II Tahun 2021

Sampai dengan triwulan II Tahun 2021, capaian kinerja fisik sasaran 10 berhasil terealisasi sebesar 101,16 persen dengan capaian anggaran sebesar 6,80 persen. Untuk capaian kinerja fisik sudah masuk dalam kategori sangat tinggi, namun untuk capaian anggaran masih masuk dalam kategori sangat rendah.

k. Sasaran Sebelas Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat

Sasaran ini terdiri dari empat program dan didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup; Dinas PUPKP; Dinas Perhubungan; Dinas Kesehatan; Satpol PP; dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Berikut adalah rincian capaian kinerja dan anggaran program-program tersebut.

Tabel 4.12. Kinerja Fisik dan Anggaran Program Prioritas Sasaran 11 Kota Yogyakarta

No	Program	Capaian Kinerja TW II	
		Fisik	Keuangan

1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	101,53	92,02
2	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	103,88	77,29
3	Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	111,31	78,81
4	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	91,98	93,89

Sumber: Dokumen Evaluasi RKPD Kota Yogyakarta Triwulan II Tahun 2021

Sampai dengan triwulan II Tahun 2021, capaian kinerja fisik sasaran 11 berhasil terealisasi 102,57 persen dengan capaian anggaran sebesar 89,18 persen. Untuk capaian kinerja fisik sudah masuk dalam kategori sangat tinggi, namun untuk capaian anggaran masih masuk dalam kategori tinggi.

1. Sasaran Duabelas Infrastruktur Wilayah Meningkat

Sasaran ini terdiri dari 14 program dan didukung oleh Dinas PUPKP; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Perhubungan; BPBD; dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Berikut adalah rincian capaian kinerja dan anggaran program-program tersebut.

Tabel 4.13. Kinerja Fisik dan Anggaran Program Prioritas Sasaran 12 Kota Yogyakarta

No	Program	Capaian Kinerja TW II	
		Fisik	Keuangan
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	74,45	48,27
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	77,52	28,69
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	104,99	44,29
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	85,10	15,49
5	Program Penataan Bangunan Gedung	54,58	5,63
6	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	86,17	45,35
7	Program Penyelenggaraan Jalan	75,00	38,07

No	Program	Capaian Kinerja TW II	
		Fisik	Keuangan
8	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	82,46	37,40
9	Program Kawasan Permukiman	81,03	47,04
10	Program Pengelolaan Persampahan	95,96	82,92
11	Program Pengembangan Perumahan	88,55	47,66
12	Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	89,98	22,29
13	Program Penanggulangan Bencana	89,89	54,26
14	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	63,53	0,14

Sumber: Dokumen Evaluasi RKPD Kota Yogyakarta Triwulan II Tahun 2021

Sampai dengan triwulan II Tahun 2021, capaian kinerja fisik sasaran 12 berhasil terealisasi 78,08 persen dengan capaian anggaran sebesar 46,78 persen. Untuk capaian kinerja fisik sudah masuk dalam kategori tinggi, namun untuk capaian anggaran masih masuk dalam kategori sangat rendah.

m. Sasaran Tigabelas Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat

Sasaran ini terdiri dari 31 program dan didukung oleh Bappeda; Dinas Kominfo; Bag. Tapem; Bagian AdPem; BLP; Bag Adm & Keu; Sekretariat Semua OPD; BPKAD; Dinas Pertanahan dan Tata Ruang; Bag. Perekonomian & Kerjasama; Dinas PUPKP; BKPSDM; Bagian Organisasi; Inspektorat; Bagian Hukum; Sekretariat DPRD; Bagian Umum & Protokol; Dinas Dukcapil; Dinas Kominfo; dan 14 Kemantren. Berikut adalah rincian capaian kinerja dan anggaran program-program tersebut.

Tabel 4.14. Kinerja Fisik dan Anggaran Program Prioritas Sasaran 13 Kota Yogyakarta

No	Program	Capaian Kinerja TW II	
		Fisik	Keuangan

No	Program	Capaian Kinerja TW II	
		Fisik	Keuangan
1	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	99,08	48,21
2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	33,34	31,11
3	Program Perekonomian Dan Pembangunan	100,00	25,30
4	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	100,24	47,00
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	95,98	30,72
6	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	82,14	25,32
7	Program Perekonomian Dan Pembangunan	100,04	69,38
8	Program Perekonomian Dan Pembangunan	98,85	81,80
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	75,15	29,12
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	98,27	66,28
11	Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	91,80	82,44
12	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	98,65	75,85
13	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	100,00	30,97
14	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	86,96	34,29
15	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	83,05	24,43
16	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	124,28	66,24
17	Program Penyelenggaraan Pengawasan	81,01	37,70
18	Pprogram Perumusan Kebijakan Pendampingan Dan Asistensi	96,28	29,53
19	Program Kepegawaian Daerah	76,55	27,80
20	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	82,24	38,72
21	Program Pendaftaran Penduduk	93,84	82,72

No	Program	Capaian Kinerja TW II	
		Fisik	Keuangan
22	Program Pencatatan Sipil	100,00	98,52
23	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100,00	57,67
24	Program Pengelolaan Arsip	101,50	85,02
25	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	106,25	82,75
26	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	73,81	49,63
27	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	92,47	67,46
28	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	92,47	67,46
29	Program Aplikasi Informatika	97,25	64,47
30	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	53,88	38,44
31	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	105,13	43,14

Sumber: Dokumen Evaluasi RKPD Kota Yogyakarta Triwulan II Tahun 2021

Sampai dengan triwulan II Tahun 2021, capaian kinerja fisik sasaran 13 berhasil terealisasi 89,95 persen dengan capaian anggaran sebesar 41,20 persen. Untuk capaian kinerja fisik sudah masuk dalam kategori tinggi, namun untuk capaian anggaran masih masuk dalam kategori sangat rendah. Pada sasaran ini terdapat satu program pendukung yang capaian kinerja fisik dan anggarannya masih masuk dalam kategori sangat rendah. Program tersebut adalah Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Adapun dalam pelaksanaan seluruh program pada masing-masing sasaran tersebut, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat. Yang menjadi faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan program-program strategis daerah hingga triwulan II 2021 adalah:

- 1) Adanya dukungan sarana dan prasarana
- 2) Komitmen pegawai dalam memberikan pelayanan
- 3) Adanya koordinasi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang baik
- 4) Adanya teknologi informasi dan sistem yang memudahkan dan mempercepat pelaksanaan kegiatan

Sementara itu, yang menjadi faktor penghambat adalah:

- 1) Adanya pandemi Covid-19 yang berimbas pada penundaan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan masyarakat luas, perubahan metode pelaksanaan kegiatan (pelatihan, pameran), serta pembatalan pekerjaan yang selanjutnya dihapus pada Perubahan APBD 2021 (Gebyar PAUD, Gebyar Lansia)
- 2) Mundurnya pelaksanaan beberapa kegiatan yang disebabkan oleh pengadaan barang melalui e-katalog sempat turun tayang, gagal lelang sehingga harus tender ulang, penyesuaian regulasi terkait SDP berdasarkan Permen PU No 14 Tahun 2020 menjadi MDP berdasarkan Perka LKPP No 12 Tahun 2021), serta aturan Perwal No 23 Tahun 2021 sebagai tindak lanjut Permendagri 77 Tahun 2021 bahwa PPKom melekat di PA/KPA, penyesuaian sub kegiatan bersumber dari DAK berdasarkan SE Mendagri serta terlambatnya juknis dari pusat, serta menyesuaikan tatakala dari pihak luar (Pengadaan CASN dan PPPK, agenda DPRD).

2. Kabupaten Kulon Progo

Terdapat 10 sasaran daerah yang tertuang didalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 yang dijabarkan ke dalam program-program prioritas sasaran daerah. Tabel berikut merangkum kinerja fisik

dan anggaran dari program-program prioritas tersebut. Secara umum, capaian kinerja fisik program-program prioritas daerah hingga triwulan II tahun 2021 telah mencapai 48,25 persen dengan kinerja anggaran sebesar 39,87 persen. Baik capaian kinerja fisik maupun anggaran masih masuk dalam kategori sangat rendah.

Tabel 4.1. Kinerja Fisik dan Anggaran Program Prioritas Sasaran Daerah Kabupaten Kulon Progo

No	Sasaran	Capaian Kinerja TW II	
		Fisik	Keuangan
1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	38,14	18,49
2	Meningkatnya prestasi generasi muda	55,25	55,87
3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	32,33	34,36
4	Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya	39,95	14,8
5	Meningkatnya pendapatan masyarakat	47,02	33,72
6	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	44,79	39,3
7	Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif	62,6	59,81
8	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah	59,06	38,13
9	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	59,75	69,13
10	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	43,56	35,12
	Tingkat Capaian	48,25	39,87

Sumber: Dokumen Evaluasi RKPD Kabupaten Kulon Progo Triwulan II Tahun 2021

Adapun dalam pelaksanaan seluruh program pada masing-masing sasaran tersebut, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat. Yang menjadi faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan program-program strategis daerah hingga triwulan II 2021 adalah:

- 1) Adanya dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang terukur
- 2) Adanya dukungan pendanaan dari APBN, pemerintah daerah DIY dan sumber dana lainnya seperti *Corporate Social Responsibility* (CSR), Perguruan Tinggi, dan sebagainya
- 3) Tingginya komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo untuk meningkatkan kinerja dan mencapai target yang telah ditetapkan
- 4) Adanya penilaian kinerja OPD setiap bulannya sehingga organisasi pemerintah daerah memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kinerja fisik dan keuangan pada masing-masing OPD

Sementara itu, yang menjadi faktor penghambat adalah:

- 1) Refocusing program/kegiatan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 melalui Perubahan Penjabaran APBD mengakibatkan penurunan target maupun penjadwalan ulang pelaksanaan program/kegiatan
- 2) Pengadaan sarana prasarana terkendala tayangnya beberapa barang yang sesuai pada e-katalog
- 3) Adanya penyesuaian nomenklatur sub-kegiatan DAK fisik dan DAK non-fisik yang berdampak pada penundaan pelaksanaan sub-kegiatan yang bersumber dari DAK
- 4) Masih tingginya penyebaran Covid-19 (beberapa pelaksana kegiatan di OPD terpapar)

3. Kabupaten Sleman

Terdapat 15 sasaran daerah yang tertuang didalam RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 yang dijabarkan ke dalam program-program prioritas sasaran daerah. Tabel berikut merangkum kinerja fisik dan anggaran dari program-program prioritas tersebut. Secara umum,

capaian kinerja fisik program-program prioritas daerah hingga triwulan II tahun 2021 telah mencapai 21,94 persen dengan kinerja anggaran sebesar 28,37 persen. Baik capaian kinerja fisik maupun anggaran masih masuk dalam kategori sangat rendah.

Tabel 4.16. Kinerja Fisik dan Anggaran Program Prioritas Sasaran Daerah Kabupaten Sleman

No	Sasaran	Capaian Kinerja TW II	
		Fisik	Keuangan
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	23,50	18,72
2	Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata	28,20	18,89
3	Meningkatnya kesempatan kerja	27,67	24,39
4	Menurunnya Kemiskinan	9,90	9,24
5	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	6,21	12,99
6	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Aksesibilitas Pendidikan	31,14	15,01
7	Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	20,45	19,35
8	Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian	14,2	12,63
9	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	19,85	11,88

No	Sasaran	Capaian Kinerja TW II	
		Fisik	Keuangan
10	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	22,49	37,3
11	Meningkatnya Kerukunan Masyarakat	30,00	68,84
12	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	27,71	37,55
13	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	21,71	83,02
14	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	18,26	17,49
15	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	27,81	38,19
	Tingkat Capaian	21,94	28,37

Sumber: Dokumen Evaluasi RKPD Kabupaten Sleman Triwulan II Tahun 2021

Adapun dalam pelaksanaan program-program tersebut, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat. Yang menjadi faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan program-program strategis daerah hingga triwulan II 2021 adalah:

- 1) Peraturan perundang-undangan tersedia
- 2) Komitmen Pimpinan dan Kerjasama Tim Pelaksana Kegiatan
- 3) Penjadwalan kegiatan dan kegiatan dilaksanakan sesuai rencana
- 4) Personil mencukupi, baik kualitas maupun kuantitas
- 5) Koordinasi dengan pihak terkait yang optimal

- 6) Sarana dan Prasarana sesuai Standar Pelayanan Minimal
- 7) Tersedianya SOP Pelayanan
- 8) Tersedia media komunikasi dan informasi

Sementara itu, yang menjadi faktor penghambat adalah:

- 1) Kegiatan yang bersifat antisipasi sehingga realisasi sulit diprediksi seperti penanganan bencana, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
- 2) Proses pengadaan barang dan jasa seperti perubahan kebijakan dalam pengadaan barang/jasa, e-purchasing/e-catalogue yang belum tayang, perubahan metode pengadaan
- 3) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akibat pandemi covid-19 menyebabkan penundaan kegoatan dan tidak optimalnya belanja makan minum rapat dan belanja perjalanan dinas
- 4) Mapping kegiatan yang bersumber dari dana pusat yang terlambat dan penyesuaian rekening belanja menghambat pelaksanaan kegiatan
- 5) Refocusing kegiatan sehubungan dengan adanya Surat Edaran Nomor SE-2/PK/2021 Tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019
- 6) Keterlambatan dalam pertanggungjawaban keuangan

4. Kabupaten Bantul

Terdapat 15 sasaran daerah yang tertuang didalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 yang dijabarkan ke dalam program-program prioritas sasaran daerah. Tabel berikut merangkum kinerja fisik dan anggaran dari program-program prioritas tersebut. Secara umum, capaian kinerja fisik program-program prioritas daerah hingga triwulan II tahun 2021 telah mencapai 42,17 persen dengan kinerja anggaran

sebesar 22,29 persen. Baik capaian kinerja fisik maupun anggaran masih masuk dalam kategori sangat rendah.

Tabel 4.2. Kinerja Fisik dan Anggaran Program Prioritas Sasaran Daerah Kabupaten Bantul

No	Sasaran	Capaian Kinerja TW II	
		Fisik	Keuangan
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	43,43	21,39
2	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	51,86	27,32
3	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	37,2	24,45
4	Turunnya Masyarakat Yang Kurang Mampu	31,95	10,36
5	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	50,74	31,03
6	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	64,57	28,25
7	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	47,22	40,78
8	Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Masyarakat	33,95	14,56
9	Terpenuhinya Kebutuhan Perikanan Masyarakat	28,51	28,05
10	Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	40,21	20,38
11	Terwujudnya lingkungan hidup yang kualitas	58,86	49,6
12	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	43,14	15,82
13	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	45	7,95
14	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	30,84	10,29
15	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	25	4,08
	Tingkat Capaian	42,17	22,29

Sumber: Dokumen Evaluasi RKPD Kabupaten Bantul Triwulan II Tahun 2021

Adapun dalam pelaksanaan program-program tersebut, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat. Yang menjadi faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan program-program strategis daerah hingga triwulan II 2021 adalah:

- 1) Adanya komitmen bersama untuk melaksanakan kegiatan tepat waktu
- 2) Efisiensi penggunaan
- 3) Penggunaan sesuai kebutuhan

Sementara itu, yang menjadi faktor penghambat adalah:

- 1) Pelaksanaan program dan kegiatan tidak sesuai jadwal
- 2) Perubahan kebijakan setelah perencanaan ditetapkan menyebabkan realisasi tidak sesuai target
- 3) Kegiatan pelatihan maupun sosialisasi terkendala adanya pembatasan berkumpul dikarenakan pandemi Covid-19

5. Kabupaten Gunungkidul

Sesuai dengan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, Kabupaten Gunungkidul memiliki 14 sasaran yang dijabarkan kedalam program-program prioritas sasaran daerah. Tabel berikut merangkum kinerja fisik dan anggaran dari program-program prioritas tersebut. Secara umum, capaian kinerja fisik program-program prioritas daerah hingga triwulan II tahun 2021 telah mencapai 42,28 persen dengan kinerja anggaran sebesar 33,87 persen. Baik capaian kinerja fisik maupun anggaran masih masuk dalam kategori sangat rendah. Tingkat capaian kinerja dan keuangan pada Triwulan II Tahun 2021 sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dalam upaya

menangani wabah Covid-19 sehingga harus dilakukan pengurangan anggaran dan beberapa kegiatan tertunda jadwalnya.

Tabel 4.18. Kinerja Fisik dan Anggaran Program Prioritas Sasaran Daerah Kabupaten Gunungkidul

No.	Sasaran	Capaian	
		Kinerja (%)	Anggaran (%)
1	Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat	45,88	44,76
2	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat	30,67	27,12
3	Ketaatan Masyarakat terhadap hukum meningkat	29,34	50,53
4	Kapasitas sumberdaya manusia meningkat	23,12	13,92
5	Jumlah Penduduk Miskin menurun	41,44	20,86
6	Angka Pengangguran menurun	32,75	12,63
7	Daya saing pariwisata Meningkat	35,51	13,4
8	Pelestarian budaya berbasis pemberdayaan meningkat	24,39	39,16
9	Infrastruktur publik wilayah meningkat	32,45	14,91
10	Pendapatan masyarakat meningkat	38,97	14,85
11	Pertumbuhan ekonomi daerah meningkat	43,53	31,44
12	Ketahanan pangan meningkat	34,25	20,06
13	Kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup meningkat	25,22	36,16
14	Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana meningkat	43,24	43,38
	TINGKAT CAPAIAN	42,28	33,87

Sumber: Dokumen Evaluasi RKPD Kabupaten Gunungkidul Triwulan II Tahun 2021

Berikut akan diuraikan secara lebih rinci capaian kinerja program prioritas sasaran daerah Kabupaten Gunungkidul sampai dengan triwulan II tahun 2021:

a. **Sasaran *pertama* Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat**

Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang ditunjukkan dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Semakin tinggi nilai yang diperoleh menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah daerah semakin baik.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah daerah. Pada tahun 2020 nilai AKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul memperoleh predikat BB, dan diharapkan nilai AKIP Pemerintah Daerah dapat terus meningkat seiring dengan perbaikan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada semua lini.

Sasaran 1 dilaksanakan oleh 46 (empat puluh enam) Perangkat Daerah dan didukung oleh 38 program dengan rincian capaian kinerja dan anggaran sebagai berikut.

Tabel 4.19. Kinerja Fisik dan Anggaran Program Prioritas Sasaran 1 Kab.Gunungkidul

NO	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	
		K	RP
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	48,26	45,75

NO	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	
		K	RP
2.	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	68,52	66,96
3.	Program penanggulangan bencana	45,02	5,57
4.	Program rehabilitasi sosial	35,44	3,78
5.	Program pengelolaan taman makam pahlawan	50,00	7,65
6.	Program perlindungan perempuan	50,00	46,55
7.	Program peningkatan kualitas keluarga	75,00	82,68
8.	Program pemenuhan hak anak (pha)	66,67	41,26
9.	Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	62,16	2,19
10	Program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan pertanahan	100,00	30,68
11	Program pendaftaran penduduk	45,89	44,04
12.	Program pencatatan sipil	52,43	21,34
13.	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	46,81	50,12
14.	Program administrasi pemerintahan desa	27,00	43,19
15.	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	57,58	46,40
16.	Program informasi dan komunikasi publik	65,74	47,91
17.	Program pelayanan penanaman modal	60,82	45,71
18.	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	15,34	16,25
19.	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	21,67	4,45
20.	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	9,81	3,52
21.	Program penyelenggaraan statistik sektoral	10,00	16,78
22.	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	12,50	20,47
23.	Program pengembangan kebudayaan	16,67	15,80
24.	Program pengembangan kesenian tradisional	33,06	15,18
25.	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	54,09	66,05
26.	Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	20,52	27,99

NO	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	
		K	RP
27.	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd	17,76	22,05
28.	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	58,75	50,74
29.	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	46,03	29,19
30.	Program kepegawaian daerah	39,13	33,00
31.	Program pengembangan sumber daya manusia	33,33	48,79
32.	Program penelitian dan pengembangan daerah	4,76	13,31
33.	Program penyelenggaraan pengawasan	43,63	35,75
34.	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	57,23	51,33
35.	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	51,31	52,95
36.	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	51,20	40,03
37.	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	18,36	4,36
38.	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	48,68	40,31
	Tingkat Capaian	45,88	44,76

Sumber: Dokumen Evaluasi RKPD Kabupaten Gunungkidul Triwulan II Tahun 2021

Sampai dengan triwulan II Tahun 2021, tingkat capaian kinerja program yang mendukung sasaran pertama telah mencapai 45,88 persen, sedangkan untuk capaian anggaran sebesar 44,76 persen. Baik capaian kinerja fisik maupun anggaran pada sasaran pertama masih masuk dalam kategori sangat rendah. Pada sasaran ini, terdapat satu program pendukung yang capaiannya sudah mencapai 100 persen. Program tersebut adalah Program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan pertanahan.

b. Sasaran *Kedua* Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat

Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang ditunjukkan dengan indikator opini BPK terhadap laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sasaran ini didukung oleh 4 (empat) program, yang dilaksanakan oleh 2 Perangkat Daerah yakni Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta Inspektorat Daerah. Berikut adalah rincian capaian kinerja dan anggaran program-program tersebut.

Tabel 4.20. Kinerja Fisik dan Anggaran Program Prioritas Sasaran 2 Kab.Gunungkidul

NO	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	
		K	RP
1	Program pengelolaan keuangan daerah	19,74	26,76
2	Program pengelolaan barang milik daerah	29,56	21,47
3	Program pengelolaan pendapatan daerah	50,52	29,53
4	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	63,30	36,77
	Tingkat Capaian	30,67	26,80

Sumber: Dokumen Evaluasi RKPD Kabupaten Gunungkidul Triwulan II Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat capaian kinerja program pendukung mencapai 30,67 persen sedangkan untuk capaian anggaran sebesar 26,80 persen. Baik capaian kinerja fisik maupun anggaran pada sasaran kedua masih masuk kategori sangat rendah.

c. Sasaran *Ketiga* Ketaatan Masyarakat terhadap Hukum Meningkat

Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap hukum yang ditunjukkan dengan indikator indeks kententraman dan ketertiban masyarakat. Semakin tinggi nilai

indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat menunjukkan ketaatan masyarakat terhadap hukum semakin baik. Sasaran 3 ini didukung 7 (tujuh) program yang dilaksanakan oleh 2 (dua) Perangkat Daerah yakni Satuan Polisi Pamong Praja serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Berikut adalah rincian capaian kinerja dan anggaran program-program tersebut.

Tabel 4.21. Kinerja Fisik dan Anggaran Program Prioritas Sasaran 3 Kab.Gunungkidul

NO	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	
		K	RP
1	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	27,80	41,92
2	Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan	0,00	37,31
3	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	25,00	51,81
4	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	40,10	96,80
5	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	0,00	38,28
6	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	6,52	19,27
7	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	67,66	29,47
	Tingkat Capaian	29,34	50,53

Sumber: Dokumen Evaluasi RKPD Kabupaten Gunungkidul Triwulan II Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat capaian kinerja program mencapai 29,34 persen sedangkan untuk capaian

keuangan sebesar 50,53 persen. Baik capaian kinerja fisik maupun anggaran pada sasaran ketiga masih masuk dalam kategori sangat rendah.

d. Sasaran *Keempat* Kapasitas sumberdaya Masyarakat Meningkatkan

Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya masyarakat yang ditunjukkan dengan indikator indeks pembangunan manusia. Semakin tinggi nilai indeks pembangunan manusia menunjukkan kapasitas sumberdaya masyarakat semakin baik. Sasaran ini didukung oleh 21 (dua puluh satu) program yang diampu 4 (empat) Perangkat Daerah yakni Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Berikut adalah rincian capaian kinerja dan anggaran program-program tersebut.

Tabel 4.22. Kinerja Fisik dan Anggaran Program Prioritas Sasaran 4 Kab.Gunungkidul

NO	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	
		K	RP
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	5,45	1,21
2.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0,00	0,00
3.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	27,77	25,62
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	71,68	27,75
5.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	41,63	25,47
6.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1,81	32,38
7.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	23,66	47,03

NO	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	
		K	RP
8.	Program Perlindungan Perempuan	31,68	49,35
9.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	0,00	0,00
10.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	0,00	0,00
11.	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	56,15	74,69
12.	Program Perlindungan Khusus Anak	23,15	21,56
13.	Program Pengendalian Penduduk	33,33	0,00
14.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	30,73	24,13
15.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	50,28	28,18
16.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	50,00	21,83
17.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	25,00	74,32
18.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	0,00	0,00
19.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	0,00	0,00
20.	Program Pembinaan Perpustakaan	38,02	16,21
21.	Program Pengelolaan Arsip	19,42	42,12
	Tingkat Capaian	23,12	13,92

Sumber: Dokumen Evaluasi RKPD Kabupaten Gunungkidul Triwulan II Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat capaian kinerja program pendukung mencapai 23,12 persen dengan capaian anggaran 13,92 persen. Baik capaian kinerja fisik maupun anggaran pada sasaran keempat masih masuk dalam kategori sangat rendah. Pada sasaran ini terdapat program yang capaian kinerja fisik dan anggarannya masih 0 persen atau dengan kata lain masih belum terlaksana. Program-program tersebut adalah: (1) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan; (2) Program Peningkatan

Kualitas Keluarga; (3) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak; (4) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan; serta (5) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan.

e. Sasaran Kelima Jumlah Penduduk Miskin Turun

Sasaran ini diarahkan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin yang ditunjukkan dengan indikator angka kemiskinan. Semakin rendah angka kemiskinan **menunjukkan** jumlah penduduk miskin mengalami penurunan. Sasaran ini dilaksanakan oleh 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan didukung dengan 6 (enam) program. Berikut adalah rincian capaian kinerja dan anggaran program-program tersebut.

Tabel 4.23. Kinerja Fisik dan Anggaran Program Prioritas Sasaran 5 Kab.Gunungkidul

NO	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	
		K	RP
1	Program pemberdayaan sosial	26,54	13,15
2	Program rehabilitasi sosial	52,14	55,71
3	Program perlindungan dan jaminan sosial	34,10	19,33
4	Program penanganan bencana	46,08	46,45
5	Program peningkatan kerjasama desa	85,71	20,00
6	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan,	30,21	30,61

NO	Program	Tingkat Capaian	
	lembaga adat dan masyarakat hukum adat		
	Tingkat Capaian	41,44	20,86

Sumber: Dokumen Evaluasi RKPD Kabupaten Gunungkidul Triwulan II Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat **capaian** kinerja program pendukung mencapai 41,44 persen dengan realisasi anggaran 20,86 persen. Baik capaian kinerja fisik maupun anggaran pada sasaran kelima masih masuk dalam kategori sangat rendah.

f. Sasaran Keenam Angka Pengangguran Menurun

Sasaran ini diarahkan untuk menurunkan angka pengangguran yang ditunjukkan dengan indikator angka pengangguran. Semakin rendah angka pengangguran menunjukkan **jumlah** pengangguran mengalami penurunan. Sasaran ini didukung oleh 4 (empat) program yang diampu oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Berikut adalah rincian capaian kinerja dan anggaran program-program tersebut.

Tabel 4.24. Kinerja Fisik dan Anggaran Program Prioritas Sasaran 6 Kab.Gunungkidul

NO	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	
		K	RP
1	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	24,33	43,92
2	Program penempatan tenaga kerja	40,16	7,27
3	Program hubungan industrial	55,83	52,15
4	Program pembangunan kawasan transmigrasi	22,22	20,96
	Tingkat Capaian	32,75	12,63

Sumber: Dokumen Evaluasi RKPD Kabupaten Gunungkidul Triwulan II Tahun 2021

Berdasarkan hasil evaluasi dari keseluruhan program yang diarahkan untuk mencapai sasaran penurunan angka pengangguran dapat dilihat bahwa tingkat capaian kinerja program pendukung mencapai 32,75 persen dengan realisasi anggaran 12,63 persen. Baik capaian kinerja fisik maupun anggaran pada sasaran keenam masih masuk dalam kategori sangat rendah.

g. Sasaran *Ketujuh* Daya saing Pariwisata Meningkat

Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan daya saing pariwisata yang ditunjukkan dengan indikator jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara; dan lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara. **Semakin tinggi** jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara; dan lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara menunjukkan daya saing pariwisata semakin baik. Sasaran ini didukung oleh 3 (tiga) program yang diampu oleh Dinas Pariwisata. Berikut adalah rincian capaian kinerja dan anggaran program-program tersebut.

Tabel 4.25. Kinerja Fisik dan Anggaran Program Prioritas Sasaran 7 Kab.Gunungkidul

NO	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	
		K	RP
1	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	37,77	13,40
2	Program pemasaran pariwisata	43,01	33,42
3	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	25,00	8,56
	Tingkat Capaian	35,51	13,40

Sumber: Dokumen Evaluasi RKPD Kabupaten Gunungkidul Triwulan II Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat capaian kinerja program pendukung mencapai 35,51 persen dan realisasi anggaran 13,40 persen. Baik capaian kinerja fisik maupun anggaran pada sasaran ketujuh masih masuk dalam kategori sangat rendah.

h. Sasaran *Kedelapan* Pelestarian Budaya berbasis Pemberdayaan Masyarakat Meningkat

Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan pelestarian budaya berbasis pemberdayaan masyarakat yang ditunjukkan dengan indikator indeks pelestarian budaya. Semakin tinggi nilai indeks pelestarian budaya menunjukkan pelestarian budaya berbasis pemberdayaan masyarakat semakin baik. Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program yang diampu oleh Dinas Kebudayaan.

Tabel 4.36. Kinerja Fisik dan Anggaran Program Prioritas Sasaran 8 Kab.Gunungkidul

NO	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	
		K	RP
1	Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan	24,39	39,16
	Tingkat Capaian	24,39	39,16

Sumber: Dokumen Evaluasi RKPD Kabupaten Gunungkidul Triwulan II Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat capaian kinerja program pendukung mencapai 24,39 persen dengan realisasi anggaran 39,16 persen. Baik capaian kinerja fisik maupun anggaran pada sasaran kedelapan masih masuk dalam kategori sangat rendah.

i. **Sasaran *Kesembilan* Infrastruktur Publik Wilayah Meningkat**

Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan infrastruktur publik wilayah yang ditunjukkan dengan indikator indeks ketersediaan infrastruktur wilayah. Semakin tinggi nilai indeks **ketersediaan** infrastruktur wilayah menunjukkan pelayanan infrastruktur publik semakin baik. Sasaran ini didukung dengan 21 program yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman; Dinas Pertanahan dan Tata Ruang; Dinas Perhubungan; serta Dinas Komunikasi dan Informatika. Berikut adalah rincian capaian kinerja dan anggaran program-program tersebut.

**Tabel 4.27. Kinerja Fisik dan Anggaran Program Prioritas Sasaran 9
Kab.Gunungkidul**

NO	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	
		K	RP
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	27,55	14,76
2.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	27,78	3,57
3.	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	0,00	26,95
4.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	0,00	36,83
5.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	0,00	11,07
6.	Program Pengembangan Permukiman	0,00	0,00
7.	Program Penataan Bangunan Gedung	63,76	10,56
8.	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	0,00	15,16
9.	Program Penyelenggaraan Jalan	3,41	9,77
10.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	28,57	46,21
11.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	41,50	34,40
12.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	0,00	0,00
13.	Program Pengembangan Perumahan	16,67	31,96
14.	Program Kawasan Permukiman	0,00	0,73
15.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	23,34	3,67
16.	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	0,00	24,17
17.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	50,00	38,40
18.	Program Penatagunaan Tanah	0,00	13,39
19.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	59,78	20,16
20.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	55,11	44,83
21.	Program Aplikasi Informatika	64,35	19,53

NO	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	
		K	RP
	Tingkat Capaian	31,97	14,85

Sumber: Dokumen Evaluasi RKPD Kabupaten Gunungkidul Triwulan II Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat capaian kinerja program pendukung sampai akhir semester I Tahun 2021 baru mencapai 31,97 persen dengan penyerapan anggaran 14,85 persen. Baik capaian kinerja fisik maupun anggaran pada sasaran kesembilan masih masuk dalam kategori sangat rendah.

j. **Sasaran *Sepuluh* Pertumbuhan Ekonomi Daerah Meningkat**

Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang ditunjukkan dengan indikator angka pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi angka pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan ekonomi daerah semakin baik. Sasaran ini didukung oleh 20 (dua puluh) program, yang diampu oleh 6 Perangkat Daerah yakni Sekretariat Daerah; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu; Dinas Kelautan dan Perikanan; serta Dinas Pariwisata. Berikut adalah rincian capaian kinerja dan anggaran program-program tersebut.

Tabel 4.28. Kinerja Fisik dan Anggaran Program Prioritas Sasaran 10 Kab.Gunungkidul

NO	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	
		K	RP
1	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	47,50	48,49
2	Program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi	60,71	85,93

NO	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	
		K	RP
3	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	47,14	43,13
4	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	25,37	38,37
5	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	29,06	10,30
6	Program pengembangan umkm	55,42	40,05
7	Program pengembangan iklim penanaman modal	50,00	36,91
8	Program promosi penanaman modal	61,35	21,34
9	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	153,40	54,21
10	Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan	25,00	1,44
11	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	37,14	70,31
12	Program perizinan dan pendaftaran perusahaan	56,00	63,68
13	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	38,66	44,74
14	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	53,33	43,41
15	Program standardisasi dan perlindungan konsumen	15,68	8,09
16	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	33,33	20,76
17	Program perencanaan dan pembangunan industri	14,94	25,72
18	Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota	33,75	40,75
19	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	50,00	46,76
20	Program perekonomian dan pembangunan	49,78	27,13
	Tingkat Capaian	43,53	31,44

Sumber: Dokumen Evaluasi RKPD Kabupaten Gunungkidul Triwulan II Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat capaian kinerja program pendukung baru mencapai 45,53 persen sedangkan untuk

capaian anggaran sebesar 31,44 persen. Baik capaian kinerja fisik maupun anggaran pada sasaran ini masih masuk dalam kategori sangat rendah. Pada sasaran ini, terdapat satu program pendukung yang capaiannya sudah mencapai 100 persen. Program tersebut adalah program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.

k. **Sasaran Sebelas Pendapatan Masyarakat Meningkat**

Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang ditunjukkan dengan indikator pendapatan perkapita penduduk. Semakin tinggi angka pendapatan **perkapita** penduduk menunjukkan pendapatan masyarakat semakin baik. Sasaran ini didukung oleh 6 (enam) program yang diampu oleh 2 Perangkat Daerah yaitu Dinas Pertanian dan Pangan serta Dinas Kelautan dan Perikanan. Berikut adalah rincian capaian kinerja dan anggaran program-program tersebut.

Tabel 4.49. Kinerja Fisik dan Anggaran Program Prioritas Sasaran 11 Kab.Gunungkidul

NO	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	
		K	RP
1	Program pengawasan keamanan pangan	64,84	59,96
2	Program pengelolaan perikanan tangkap	22,56	47,04
3	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	14,50	60,58
4	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	30,00	1,10
5	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	63,64	65,50
6	Program penyuluhan pertanian	54,35	43,40
	Tingkat Capaian	38,70	12,74

Sumber: Dokumen Evaluasi RKPD Kabupaten Gunungkidul Triwulan II Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat capaian kinerja program pendukung mencapai 38,70 persen dengan capaian anggaran sebesar 12,74 persen. Baik capaian kinerja fisik maupun anggaran pada sasaran ini masih masuk dalam kategori sangat rendah.

I. Sasaran *Duabelas* Ketahanan Pangan Meningkat

Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan ketahanan pangan yang ditunjukkan dengan indikator **jumlah** desa rawan pangan. Semakin sedikit jumlah desa rawan pangan menunjukkan ketahanan pangan semakin baik. Sasaran ini didukung oleh 6 program yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Berikut adalah rincian capaian kinerja dan anggaran program-program tersebut.

Tabel 4.30. Kinerja Fisik dan Anggaran Program Prioritas Sasaran 12
Kab.Gunungkidul

NO	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	
		K	RP
1.	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	0,00	39,87
2.	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	41,53	81,77
3.	Program penanganan kerawanan pangan	25,00	67,25
4.	Program pengelolaan perikanan budidaya	39,72	13,11
5.	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	32,85	4,06
6.	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	47,72	61,83
	Tingkat Capaian	34,25	20,06

Sumber: Dokumen Evaluasi RKPD Kabupaten Gunungkidul Triwulan II Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, tingkat capaian kinerja fisik telah mencapai 34,25 persen dan capaian anggaran sebesar 20,06 persen. Baik capaian kinerja fisik maupun anggaran pada sasaran ini masih masuk dalam kategori sangat rendah.

m. Sasaran *Tigabelas* Kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Meningkat

Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang ditunjukkan dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup. Semakin tinggi nilai indeks kualitas lingkungan hidup menunjukkan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup semakin baik. Sasaran ini didukung oleh 9 program yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Berikut

adalah rincian capaian kinerja dan anggaran program-program tersebut.

2021

**Tabel 4.31. Kinerja Fisik dan Anggaran Program Prioritas Sasaran 13
Kab.Gunungkidul**

NO	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	
		K	RP
1	Program perencanaan lingkungan hidup	50,00	54,13
2	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	10,06	35,78
3	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	17,86	29,24
4	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)	45,00	38,34
5	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	33,16	42,82
6	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	0,00	0,87
7	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	0,00	20,00
8	Program pengelolaan persampahan	52,86	38,19
9	Program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	0,00	0,00
	Tingkat Capaian	25,22	36,16

Sumber: Dokumen Evaluasi RKPD Kabupaten Gunungkidul Triwulan II Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat capaian kinerja program pendukung mencapai 25,22 persen dengan serapan keuangan mencapai 36,16 persen. Baik capaian kinerja fisik maupun anggaran pada sasaran ini masih masuk dalam kategori sangat rendah. Pada sasaran ini terdapat program yang capaian kinerja fisik dan anggarannya masih 0 persen atau dengan kata lain masih belum terlaksana. Program tersebut adalah program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

n. Sasaran *Empatbelas* Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana Meningkat

Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana yang ditunjukkan dengan indikator persentase desa tangguh bencana. Semakin tinggi persentase desa tangguh bencana menunjukkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana semakin baik. Sasaran ini didukung oleh 2 program yang dilaksanakan oleh BPBD.

Tabel 4.32. Kinerja Fisik dan Anggaran Program Prioritas Sasaran 14 Kab.Gunungkidul

NO	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	
		K	RP
1	Program penanggulangan bencana	45,69	43,40
2	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	28,59	43,10
	Tingkat Capaian	43,24	43,38

Sumber: Dokumen Evaluasi RKPD Kabupaten Gunungkidul Triwulan II Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat capaian kinerja program pendukung mencapai 43,24 persen dengan realisasi keuangan sebesar 43,38 persen. Baik capaian kinerja fisik maupun anggaran pada sasaran ini masih masuk dalam kategori sangat rendah.

Adapun dalam pelaksanaan program-program tersebut, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat. Yang menjadi faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan program-program strategis daerah hingga triwulan II 2021 adalah:

- 1) Koordinasi yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam pelaksanaan program dan kegiatan

Sementara itu, yang menjadi faktor penghambat adalah:

- 1) Proses pengadaan barang melalui e-katalog terkendala sebagian produk mengalami turun tayang sehingga harus menunggu barang tersedia kembali di e-katalog atau dilakukan perubahan mekanisme pengadaan
- 2) Adanya Surat Mendagri Nomor 906/923 tentang Pemetaan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17 Tahun 2021 menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran dan penyesuaian dokumen perencanaan pekerjaan sehingga pelaksanaan beberapa sub kegiatan mundur dari waktu yang direncanakan
- 3) Sub kegiatan dalam bentuk pertunjukan rakyat, bimtek, pelatihan, sosialisasi, penyuluhan mundur dari jadwal yang direncanakan karena adanya Instruksi Bupati Nomor 443/0139 tentang PPKM Mikro di Kabupaten Gunungkidul dan SE Bupati Nomor 443/0132 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai untuk Pengendalian COVID-19 di Kabupaten Gunungkidul beserta aturan perubahannya.

Bab V

Kesimpulan Dan Rekomendasi

A. Kesimpulan

Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota merupakan bentuk pengendalian di dalam memastikan ketercapaian kinerja antara dokumen RPJMD dan program yang telah terlaksana di masing-masing Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil analisis evaluasi RKPD Kabupaten/Kota Semester I Tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja program-program yang ditujukan untuk mencapai sasaran prioritas daerah di masing-masing Kabupaten/Kota pada triwulan II tahun 2021 secara umum masih sangat rendah. Pengecualian terjadi pada capaian kinerja fisik Kota Yogyakarta yang sudah mencapai 90,84 persen sehingga masuk kategori sangat tinggi.

Tabel 5.5 Capaian Kinerja Fisik dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Triwulan II Tahun 2021

No.	Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Fisik (%)	Predikat	Capaian Kinerja Anggaran (%)	Predikat
1	Kota Yogyakarta	90,84	Sangat tinggi	49,66	Sangat rendah
2	Kulon Rogo	48,25	Sangat rendah	39,87	Sangat rendah
3	Sleman	21,94	Sangat rendah	28,37	Sangat rendah
4	Bantul	42,17	Sangat rendah	22,29	Sangat rendah
5	Gunungkidul	42,28	Sangat rendah	33,87	Sangat rendah

2. Adapun faktor penghambat yang menyebabkan capaian kinerja fisik dan anggaran sangat rendah adalah karena adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan beberapa kegiatan yang melibatkan pertemuan fisik dengan banyak orang tertunda atau tidak terlaksana serta gagal lelang beberapa barang di e-katalog.

B. Rekomendasi dan Saran

Rekomendasi bagi Kabupaten/Kota dalam melaksanakan dan merumuskan RKPD untuk periode berikutnya adalah:

1. Perlunya komitmen dari seluruh pihak untuk memaksimalkan pelaksanaan program/kegiatan terlebih dalam era normal baru;
2. Diperlukan terobosan dan inovasi dalam pelaksanaan program/kegiatan di era normal baru, seperti memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dalam rapat koordinasi atau pelaksanaan pelatihan/bimtek;
3. Diperlukan peraturan, panduan dan administrasi yang lebih baik dan sederhana dalam proses lelang dengan pihak ketiga agar keterlambatan lelang tidak terjadi secara berulang;
4. Perlu adanya konsistensi nomenklatur program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi dengan membuat SIM yang terintegrasi, sehingga perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota tidak perlu berkali dalam melakukan proses *input* data.

Dari segi pelaporan dokumen evaluasi RKPD, ada beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti untuk RKPD tahun berikutnya:

1. Perlu disepakati format pelaporan capaian kinerja yang sama. Hal ini diperlukan mengingat pada dokumen evaluasi RKPD Kabupaten/Kota Triwulan II Tahun 2021 masih dijumpai ketidaksamaan format pelaporan capaian kinerja. Sebagai contoh: Kota Yogyakarta mendasarkan pelaporan capaian kinerja 100 persen hingga triwulan II tahun 2021, sehingga capaian kinerja beberapa program pada sasaran prioritasnya yang sudah melebihi 100 persen. Sementara itu, Kabupaten Gunungkidul

mendasarkan pelaporan capaian kinerja 50 persen hingga triwulan II tahun 2021, sehingga capaian kinerja sebagian besar program pada sasaran prioritasnya tidak melebihi 50 persen.

2. Perlu disepakati format pelaporan program yang mendukung pencapaian sasaran prioritas. Hal ini diperlukan mengingat pada dokumen evaluasi RKPD Kabupaten/Kota Triwulan II Tahun 2021 masih dijumpai ketidaksamaan format pelaporan program. Sebagai contoh: Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul melaporkan secara rinci program-program yang mendukung pencapaian kinerja masing-masing sasaran. Sementara itu, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul tidak merinci program-program tersebut.

Daftar Pustaka

Anderson, J (1975). *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Dunn, William N (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hasil Desk Kabupaten Kota Triwulan I dan II Tahun 2020.

Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Bantul Triwulan I dan II Tahun 2020.

Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Gunungkidul Triwulan I dan II Tahun 2020.

Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Kulon Progo Triwulan I dan II Tahun 2020.

Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Sleman Triwulan I dan II Tahun 2020.

Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kota Yogyakarta Triwulan I dan II Tahun 2020.

Monitoring dan Evaluasi APBD dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Gubernur DIY Nomor 48 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Daerah.

Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tata Cara Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah Dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tata cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Raport Kabupaten/Kota Triwulan II Tahun 2020

Ripley, Randall B. (1985). *Policy Analysis in Political Science*. Chicago: Nelson-Hall Publisher.

Riyadi, Bratakusumah, 2004, "Perencanaan Pembangunan Daerah", PT Gramedia Pustaka utama, Jakarta.


Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58).

EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN/KOTA SEMESTER I TAHUN 2021



BAPPEDA DIY
Kompleks Kepatihan Danurejan
Yogyakarta

 (0274) 589583
Fax. (0274) 586712

<http://www.bappeda.jogjaprov.go.id>
bappeda@bappeda.pemda-diy.go.id